

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial ekonomi tidak sekedar mengatasi kemiskinan tetapi juga memastikan kecukupan pangan secara merata upaya mengakhiri kelaparan dan kerawanan pangan ekstrem yang krusial dan fundamental mengakhiri kelaparan ekstrem. Secara global, kelaparan diderita 733 juta jiwa dengan tingkat kerawanan pangan mencapai 2,33 miliar jiwa di tahun 2023 yang menunjukkan kondisi stagnasi tingkat kelaparan dan kerawanan pangan pasca Pandemi Covid-19. Di tahun 2022, balita mengalami stunting mencapai 148 juta anak. Kondisi konflik, mengakibatkan rantai pasokan global terganggu dan kenaikan harga pangan yang diderita 60 persen negara.² Mengacu *Sustainable Development Report 2024*, Indonesia menempati urutan ke 78 dengan capaian score 69.4, dan berada diposisi ke 7 di Asia Selatan dan Timur dengan indikator tanpa kelaparan (SDGs2) dengan tren stagnan sebagai tantangan besar untuk diatasi.³ Kondisi ini menunjukkan isu ketahanan pangan menjadi permasalahan diderita disejumlah negara yang sedang berkembang begitupun di Indonesia yang secara struktural wilayah pembangunan belum merata.

Disisi lain, dampak ketidakstabilan kondisi ekonomi dan struktural pembangunan wilayah tidak merata menimbulkan rendahnya tingkat sejahtera

² United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2024* (New York, 2024), 10, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/>.

³ Jeffrey Sachs, Guillaume Lafortune, and Grayson Fuller, *Sustainable Development Report 2024 The SDGs and the UN Summit of the Future Includes the SDG Index and Dashboards*, *Sustainable Development Solutions Network*, 2024th ed. (Ireland,: Dublin University Press Dublin, 2024), 20–25, www.dublinuniversitypress.com.

yang memperdalam jurang kesenjangan dan kerentanan dapat mempengaruhi individu dalam kelangsungan hidup terutama pemenuhan akses dasar pangan. Kemiskinan dan kelaparan berkaitan, kemiskinan rendahnya akses dasar, kelaparan akibat tidak tersedianya kebutuhan pokok dasar.⁴ Kerawanan pangan akibat akses sumber daya yang rendah termasuk miskin.⁵ Keterbatasan menjangkau sumber daya terjadi akibat kondisi kemiskinan dan rentan diperparan kondisi perekonomian dan struktural buruk, ketimpangan, dan akses dasar berdampak pada akses pangan sebagian masyarakat terbatas.

Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia dipengaruhi faktor insentif rendah, perubahan iklim, perluasan lahan, serta stabilitas harga pangan.⁶ Rendahnya faktor produksi, pergeseran lahan pertanian, struktur pasar serta fasilitas keuangan sebagai penentu prospek ketahanan pangan.⁷ Kemudian, kesejahteraan petani rendah, alih fungsi lahan, distribusi dan spekulasi distributor.⁸ Penanganan kurang cepat dalam peningkatan sumber pembiayaan, kualitas SDM, regulasi, dan teknologi.⁹ Temuan studi terdahulu menunjukkan faktor ketahanan pangan terutama alih fungsi lahan pertanian, upah, struktur

⁴ Cordelia Onyinyechi Omodero, "Sustainable Agriculture, Food Production and Poverty Lessening in Nigeria," *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 1 (2021): 81–87.

⁵ Agung Hendriadi and Mewa Ariani, "Food and Nutrition Insecure Household Alleviation: Magnitude, Causes, Impacts, and Policies," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 38, no. 1 (2024): 13–27, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3546>.

⁶ Andi Syah Putra, Guangji Tong, and Didit Okta Pribadi, "Food Security Challenges in Rapidly Urbanizing Developing Countries: Insight from Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 22 (2020): 15.

⁷ Mohamad Yusri et al., "A Confirmatory Analysis of Food Security in North Sumatera," *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 18, no. 1 (March 31, 2021): 64–77, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr/article/view/33787>.

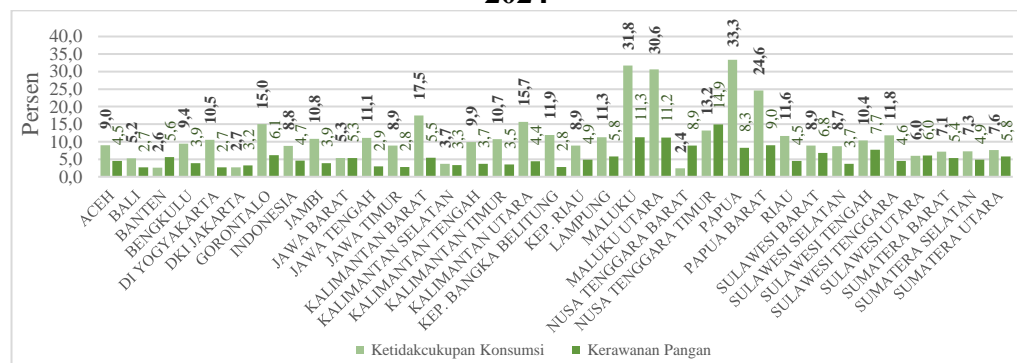
⁸ Lilies Setiartiti, "Critical Point of View: The Challenges of Agricultural Sector on Governance and Food Security in Indonesia," ed. Juwaidah et al., *E3S Web of Conferences* 232 (January 25, 2021): 11, <https://www.e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202123201034>.

⁹ Tubagus Chaeru Nugraha et al., "Solutions to Food Security Problems in Indonesia: An Islamic Perspective," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 6, no. 2 (November 19, 2023): 160–168, <https://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/216>.

pasar serta rendahnya fasilitas pendukung termasuk pembiayaan serta kondisi miskin dan rentan dapat menimbulkan kerawanan dan ketidacukupan pangan.

Berikut tingkat kerawanan dan ketidacukupan pangan:

Grafik 1.1 Rerata Kerawanan dan Ketidacukupan Pangan (%) 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Mengacu Grafik 1.1 kerawanan pangan terparah terutama di Indonesia Timur mencakup NTT 14,48 persen, Maluku 11,2 persen dan Maluku Utara 11,1 persen termasuk wilayah Papua.¹⁰ Kemudian proporsi ketidacukupan konsumsi tertinggi terutama di provinsi Papua 33,3 persen, Maluku 31,8 persen, Maluku Utara 30,6 persen dan Papua Barat 24,6 persen.¹¹ Disisi lain, Provinsi seperti NTT, Maluku, Papua memiliki persentase kemiskinan yang cenderung tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, Per Maret 2024 kemiskinan di NTT mencapai 19,48 persen, Maluku mencapai 16 persen, Papua mencapai 17,26 persen dan Papua Barat mencapai 21,66 persen.¹² Hal ini menunjukkan

¹⁰ BPS, "Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Persen), 2024," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2025, accessed September 19, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NCMy/prevalensi-penduduk-dengan-kerawanan-pangan-sedang-atau-berat-berdasarkan-pada-skala-pengalaman-kerawanan-pangan.html>.

¹¹ BPS, "Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen), 2024," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2025, accessed September 19, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidacukupan-konsumsi-pangan--persen-.html>.

¹² BPS, "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi Dan Daerah (Persen), 2024," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2026, accessed April 9, 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>.

keterbatasan masyarakat menjangkau akses dasar termasuk pangan berimbang pada kondisi ketidakcukupan dan kerawanan pangan disuatu wilayah.

Tingginya kerawanan pangan di Nusa Tenggara (NTT dan NTB), Maluku dan Maluku Utara termasuk Papua terutama tingginya angka kemiskinan, penduduk berpenghasilan utama disektor pertanian dan pendidikan yang rendah. Mengacu pada laporan analisis kerawanan pangan 2024, sebagian besar provinsi faktor kerawanan pangan disebabkan tingginya angka kemiskinan, pendidikan rendah dan usia (lansia).¹³ Di lain sisi Ketahanan pangan di NTT dipengaruhi perubahan iklim dan kekeringan.¹⁴ Kemudian, pemmasalahan pangan di Maluku akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010-2020 mencapai 1,8 per tahun yang tidak diimbangi dengan peningkatan laju produktivitas pangan, infrastruktur dan investasi pangan yang rendah, perubahan iklim termasuk disersifikasi pangan terbatas.¹⁵

Meskipun Papua memiliki sumber daya melimpah tetapi kondisi dihadapkan pada kemandirian dan pengelolaan pangan yang rendah akibat ketergantungan impor.¹⁶ Temuan studi Septinus Saa, tantangan ketahanan pangan di Papua menghadapi ketergantungan impor, akses pasar, infrastruktur pertanian tidak memadai.¹⁷ Permasalahan tingginya tingkat ketidakcukupan

¹³ Badan Pangan Nasional and BPS, *Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dan Kewilayahan* (Jakarta, 2024), <https://id.scribd.com/document/906899535/V10-1-Buku-Analisis-Rawan-Pangan-2024>.

¹⁴ Indri Arrafi Juliannisa et al., "Regional Vulnerability to Food Insecurity: The Case of Indonesia," *Sustainability* 17, no. 11 (May 23, 2025): 4800, <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/11/4800>.

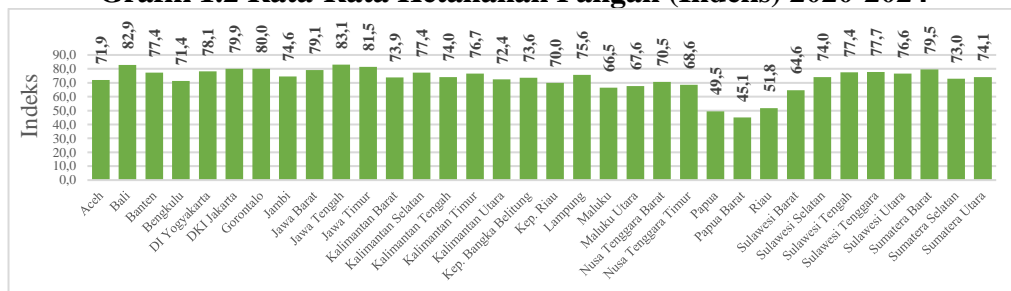
¹⁵ Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* (Maluku, 2023), 2, <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/rBzZdi4IzWAZKwverWZmFuojuVo5tsK1XB5tmXWa.pdf>.

¹⁶ Bappeda Provinsi Papua, *Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2023* (Papua, 2023), 6, https://bapperida.papua.go.id/file/LAPORAN_AKP_PAPUA_2023_compressed.pdf.

¹⁷ Septinus Saa, "Evaluation of the Policy Program for Strengthening Local Food Commodities for Sustainable Food Security in Papua," *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (June 30, 2024): 478, <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4167>.

konsumsi di Papua akibat adanya hambatan secara geografis dan infrastruktur terutama wilayah pedalaman, terpencil dan pegunungan yang mana akses terbatas dan tidak memadai. Dengan adanya faktor alam ataupun kondisi geografis wilayah berimbas pada ketahanan pangan nasional. Berikut pemaparan data Indeks Ketahanan Pangan di 34 Provinsi:

Grafik 1.2 Rata-Rata Ketahanan Pangan (Indeks) 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional (BPN), 2025

Mengacu Grafik 1.2, ketahanan pangan terutama di Provinsi di Jawa, Bali, Sumatra barat memiliki indeks ketahanan pangan tinggi. Sedangkan provinsi Papua, Maluku, NTT memiliki indeks ketahanan pangan rendah.¹⁸ Melalui “*Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan (BPN) 2020-2024*”, mewujudkan ketahanan pangan diperlukan pendanaan skala besar tidak hanya mengandalkan pendanaan APBN didukung APBD, peran BUMS/BUMN/ BUMD dan sindikasi Internasional.¹⁹ Pendanaan menguatkan ketahanan pangan bersumber dari keuangan publik ataupun swasta dengan alokasi pengapusan kelaparan.²⁰ Pendanaan mendorong investasi litbang sistem sektor

¹⁸ Badan Pangan Nasional, “Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Update Tahun 2024,” *Badan Pangan Nasional*, last modified 2024, accessed September 20, 2025, <https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/frq/ikp-kab-kota-2024>.

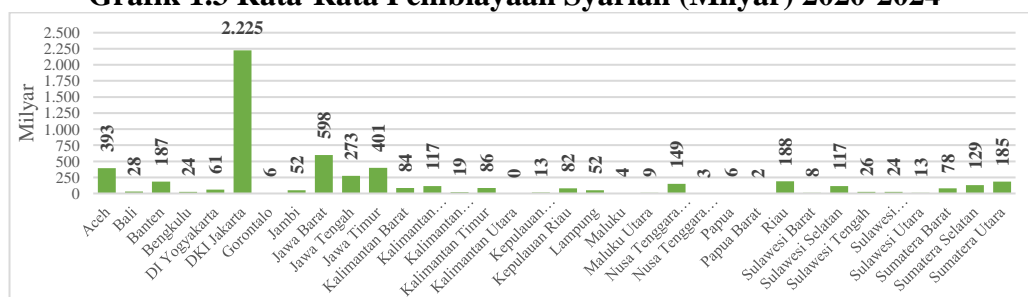
¹⁹ Badan Ketahanan Pangan, *Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024* (Jakarta, 2020): 30, <https://share.google/Y9FQspuVhqOIQAYmQ>.

²⁰ Olena Shebanina et al., “Funding Processes for Strengthening Global Food Security: Challenges and Innovative Solutions,” *Oblik i finansi* 1, no. 1(107) (2025): 107–109, <http://www.afj.org.ua/pdf/1130-finansuvannya-zahodiv-z-posilennya.pdf>.

pertanian.²¹ Kondisi ini menunjukkan isu ketahanan pangan permasalahan krusial diatasi mengingat dampak tidak hanya sebatas kelaparan tetapi juga stunting hingga kematian. Kapasitas pembiayaan dari berbagai sumber (*blended finance*) yang memadai strategis menjadi mekanisme mendorong distribusi dan memperkuat produktivitas perekonomian mengarah penguatan sektor pertanian dan kedaulatan pangan.

Dalam hal pendanaan, pembiayaan Syariah memiliki potensi besar mendukung ketahanan pangan, diperkuat prinsip Islam yaitu menciptakan kemaslahatan, keadilan serta pembiayaan sektor rill.²² Sistem keuangan Islam memobilisasi sumberdaya berkontribusi dalam pemberdayaan sosial termasuk pengetasan kelaparan.²³ Pembiayaan syariah diposisikan sebagai sumber permodalan ramah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mendorong pembiayaan sektor rill secara inklusif. Berikut pemaparan data pembiayaan syariah:

Grafik 1.3 Rata-Rata Pembiayaan Syariah (Milyar) 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025

²¹ Christopher Brendan Barrett, "Overcoming Global Food Security Challenges Through Science and Solidarity," *American Journal of Agricultural Economics* 103, no. 2 (October 18, 2021): 18, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1093/ajae/aax020>.

²² Fauziah Chairiyati, Evania Herindar, and Muhammad Irsyad, "How Islamic Commercial Banks in Indonesia Contributing to Achieving SDGs-8: Decent Work and Economic Growth?," *Sebelas Maret Business Review* 9, no. 2 (July 21, 2024): 79, <https://jurnal.uns.ac.id/SMBR/article/view/86849>.

²³ Siti Nurain Muhmad, Rusnah Muhamad, and Farizah Sulong, "Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions," *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management* 5, no. 1 (June 30, 2021): 129–131, <https://asianonlinejournals.com/index.php/ijSAM/article/view/7192>.

Mengacu Grafik 1.3 Rata-rata pembiayaan syariah tertinggi terutama di Jakarta mencapai Rp2.225 Triliun, sedangkan provinsi lain pembiayaan syariah tidak sebesar di Pulau Jawa dan Sumatra.²⁴ Mengacu “*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2023*” pembiayaan syariah BUS sektor pertanian mencapai Rp29 Triliun.²⁵ Mengacu UUS LPEI pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3.68 Triliun (51.45%) dari keseluruhan pembiayaan, dan Industri sebesar Rp1.87 Triliun.²⁶ Sektor pertanian salah satu prioritas pembiayaan syariah berkontribusi dalam ketahanan pangan.²⁷ Pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan dengan keunggulan tanpa bunga dan akad bagi hasil. Namun, dihadapkan tantangan penyaluran pembiayaan dan risiko tinggi pembiayaan sektor pertanian.²⁸ Serta dihadapkan tantangan optimalisasi terbatas akibat pembiayaan syariah dominan membiayai sektor yang minim risiko dan non pertanian serta rendahnya inklusi keuangan syariah.

Tidak hanya peran perbankan Islam yang menyediakan keuangan komersial. Adanya keterbatasan pembiayaan syariah, keuangan komersial tidak semata cukup untuk meningkatkan jangkauan masyarakat *unbanked*. Oleh karenanya diperlukan instrumen *Islamic Social Finance* terutama potensi pendistribusian zakat dalam mendorong kesejahteraan secara merata, adil dan

²⁴ OJK, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta, 2025), <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.

²⁵ OJK, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta Pusat, 2023), 22, [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf).

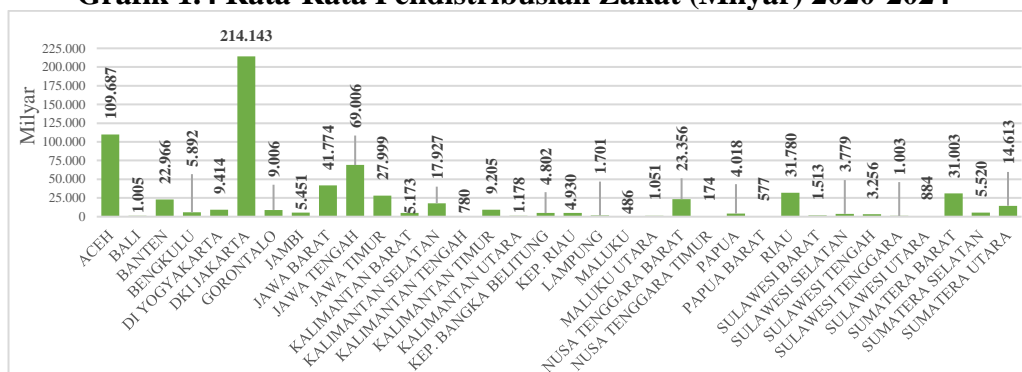
²⁶ OJK, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024, Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta, 2024), 107.

²⁷ Ubaid Ahmed et al., “The Role of Islamic Finance in Sustainable and Green Transition,” *Suhuf* 36, no. 2 (November 19, 2024): 119, <https://journals2.ums.ac.id/suhuf/article/view/6314>.

²⁸ Muhammad Azizi Akbar Lubis and Kamila, “Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Terhadap Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pembiayaan Murabahah BSI Binjai),” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2855–2866.

kepedulian kaum rentan. Zakat sebagai pilar instrumen keuangan Islam berpotensi memberantas kemiskinan dan kelaparan, inklusi keuangan, dan kontribusi SDGs.²⁹ Peran zakat dan infak jangka pendek sebagai instrumen pengetasan stunting dan malnutrisi, serta jangka panjang mendukung pertanian dan ketahanan pangan.³⁰ Berikut pemaparan data pendistribusian zakat:

Grafik 1.4 Rata-Rata Pendistribusian Zakat (Milyar) 2020-2024



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2025

Sesuai Grafik 1.4 Pendistribusian zakat berpusat di pulau Jawa dengan persebaran di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur sedangkan di provinsi lain pendistribusian zakat rendah.³¹ Meskipun demikian, potensi pendistribusian zakat 2024 mencapai Rp39,508 Triliun dengan selisih dari tahun 2023 mencapai Rp8,277 Triliun dan pendayagunaan bidang pemberdayaan ekonomi mencapai Rp 614,764 Miliar yang meningkat 36 persen dari 2023 dengan pendayagunaan mencapai Rp450,776 Miliar.³² Sedangkan program yang telah dijalankan seperti lumbung pangan, balai ternak, bagian

²⁹ Fares Djafri and Younes Soualhi, *Islamic Finance: Shariah and the SDGS Thought Leadership Series Part 4 - October 2021* (United Kingdom, 2021), 17.

³⁰ Mohammad Zen Nasrudin Fajri et al., "SDGs in Islamic Commercial and Social Finance Literature: A Bibliometric and Content Analysis," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 11, no. 1 (June 30, 2025): 147, <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/64146>.

³¹ Baznas, "Desain Target Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat 2024" (Jakarta, 2024).

³² Baznas, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024* (Jakarta, 2024), 50–64, https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ_Nasional_Akhir_Tahun_2024.pdf.

dari penanganan kemiskinan.³³ Zakat berpotensi menjadi instrumen peningkatan produktivitas pertanian dan konsumsi tersalurkan dalam permodalan usaha tani, UMKM, peternakan yang mendorong kemandirian dan kebutuhan pangan.³⁴ Mengacu UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan mencukupi kebutuhan *Daruriyah* termasuk tanpa kelaparan.³⁵

Pembiayaan syariah dan pendistribusian zakat berkorelasi dengan kesejahteraan dan mendukung ketahanan pangan. Namun, efektifitas pendistribusian zakat belum sepenuhnya optimal akibat rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat. Pengelolaan zakat belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat.³⁶ Termasuk, ketidakakuratan data akibat pengambilan dan pendistribusian zakat tidak tercatat sistem akibat dikelola secara informal.³⁷ Efektifitas pendistribusian zakat mendukung ketahanan pangan dipengaruhi pengelolaan dan skala prioritas pendistribusian mengingat kecenderungan tertuju untuk masyarakat rentan. Hambatan akses pembiayaan syariah dan pendistribusian zakat cenderung di Pulau Jawa, peranan instrumen berbasis teknologi dinilai alternatif mengatasi tantangan akses dan jangkauan kelembangaan dan geografi terutama inovasi keuangan digital.

³³ Baznas, *Laporan Zakat Dan Pengetasan Kemiskinan Baznas RI* (Jakarta, 2025), 23, https://drive.google.com/file/d/1yNud_KCXxqzCrrX-b-Om26s-_1xxbFsL/view.

³⁴ Baznas, *Implementasi Baznas Indeks Untuk Ketahanan Pangan Mustahik* (Jakarta, 2025), 8–9, <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2032-implementasi-baznas-indeks-untuk-ketahanan-pangan-mustahik>.

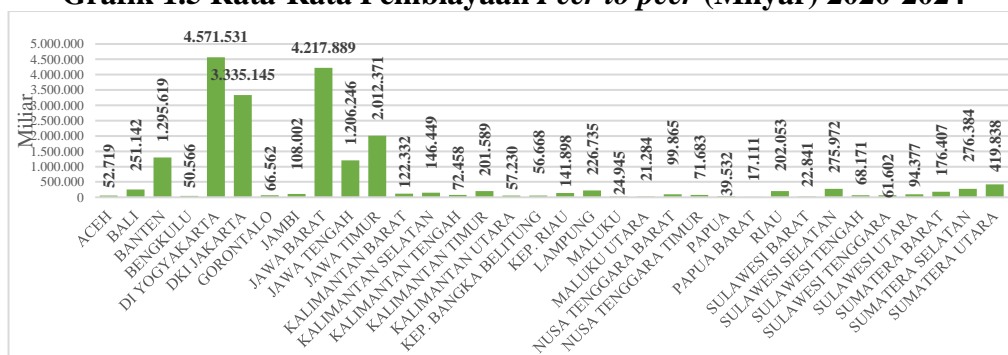
³⁵ Baznas, *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs, Baznas* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021), 27–28.

³⁶ Abu Hamid Aziz and Moniruzzaman, “Challenges in Achieving SDG 2-Zero Hunger in Bangladesh: An Analytical Study on Food Certainty in Bangladesh from Zakat Perspective,” *International Journal of Zakat* 8, no. 1 (2023): 43–63.

³⁷ OECD, *How Islamic Finance Contributes to Achieving the Sustainable Development Goals* (Paris: OECD Publishing, 2020), 19–23, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/06/how-islamic-finance-contributes-to-achieving-the-sustainable-development-goals_ba8b0e21/ac1480ca-en.pdf.

Perkembang waktu munculnya inovasi keuangan mengadopsi teknologi digital melalui layanan *peer to peer* dirancang berkontribusi memaksimalkan peran perbankan baik pembiayaan syariah dan konvensional. Dalam “*Roadmap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028*” sebagai regulasi pinjaman berbasis online serta pengembangan dan penguatan yang berkontribusi pada UMKM dan produktif baik tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.³⁸ Berikut data pembiayaan *peer to peer*:

Grafik 1.5 Rata-Rata Pembiayaan *Peer to peer* (Milyar) 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025

Mengacu Grafik 5 Pembiayaan *peer to peer* didominasi di pulau Jawa terutama Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta, sedangkan luar Jawa penggunaan *peer to peer* rendah.³⁹ Banyak provinsi belum terlayani, digitalisasi dan teknologi rendah.⁴⁰ Selaras Nicklaus S, akumulasi penyaluran pinjaman *peer to peer* didominasi di Jawa akibat asimetri informasi, regulasi, kelayakan

³⁸ OJK, “Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), 13–24, <https://share.google/bchPqtakK2g33m1oV>.

³⁹ OJK, “Statistik Fintech 2020-2024,” Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

⁴⁰ Kohardinata Cliff et al., “Pengaruh Digital Skill Dan Literasi Keuangan Terhadap Penyaluran Pinjaman P2P Di Luar Pulau Jawa,” *Jurnal Pendidikan Tambunsai* 7, no. 1 (2023): 3800–3805, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5825%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/5825/4889>.

pinjaman.⁴¹ Kemudian pemahaman rendah, kurangnya perlindungan data, penipuan, pinjaman ilegal dan pemasaran menyalahi aturan OJK.⁴² Faktor penghambat fintech mempengaruhi seseorang mengadopsi inovasi teknologi.

Meskipun demikian, temuan Hudaefi, *fintech* pembiayaan sektor pertanian melalui *Crowde*, *TaniFund* dan *Igrow* berperan mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, serta pembiayaan sektor pertanian dan UKM.⁴³ Studi dari Afif A.R dan Eliana, *TaniFund* memberikan pelatihan dan pemasaran.⁴⁴ Studi Subkhi Abdul, pinjaman *peer to peer* berdampak pada sektor pertanian, permodalan, dan infrastruktur pertanian hingga penjualan hasil panen petani.⁴⁵ Pembiayaan *peer to peer* menghadirkan fleksibilitas dan jangkauan akses keuangan yang lebih luas dan menjadi alternatif layanan perbankan formal.

Tidak hanya peran keuangan komersial dan lembaga sosial. Pada konteks ini peranan pemerintah krusial dalam menciptakan ketahanan pangan tanpa terkecuali melalui redistribusi fiskal. Secara makro alokasi fiskal dan belanja publik mengurangi dampak negatif kerawanan pangan, meningkatkan akses

⁴¹ Nicklaus Stanley and Cliff Kohardinata, "Financial Technology Peer to Peer Dan Kredit Perbankan: Kompetisi Atau Kolaborasi?," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 9, no. 1 (February 25, 2025): 39–41, <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/23918>.

⁴² Ryan Randy Suryono, Indra Budi, and Betty Purwandari, "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia," *Heliyon* 7, no. 4 (April 2021): e06782, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405844021008859>.

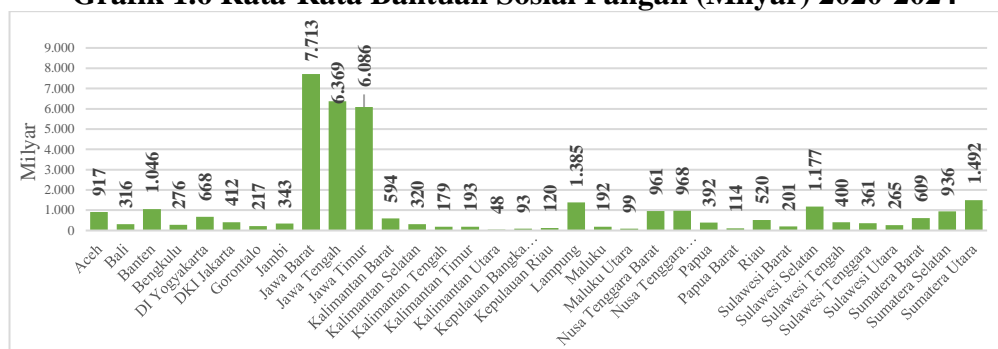
⁴³ Fahmi Ali Hudaefi, "How Does Islamic Fintech Promote the SDGs? Qualitative Evidence from Indonesia," *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 4 (2020): 353–366.

⁴⁴ Afif Ahmad Rifai and Eliana Wulandari, "Kontribusi Financial Technology Bidang Pertanian Dalam Meningkatkan Permodalan Guna Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Agrinika: Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis* 6, no. 2 (September 29, 2022): 240–251, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/agrinika/article/view/2249>.

⁴⁵ Subkhi Abdul Aziz, Ria Jayanti, and Anggini Dinaseviani, "The Role of Bank and Startup Fintech P2P Lending in Supporting Financial Credit for Indonesian Farmers," *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 12, no. 1 (April 25, 2024): 47–66, <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/23575>.

penerima manfaat dari masyarakat berpendapatan rendah.⁴⁶ Bantuan sosial pangan, alokasi APBD berupa belanja daerah untuk masyarakat kurang mampu untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan berupa uang elektronik untuk ditukarkan di *e-warong*.⁴⁷ Adapun data bantuan sosial pangan, berikut:

Grafik 1.6 Rata-Rata Bantuan Sosial Pangan (Milyar) 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Pada Grafik 1.6 pendistribusian bantuan sosial pangan di 34 Provinsi tidak merata, dengan rerata tertinggi Jawa Barat Rp7.713 Triliun, Jawa tengah Rp6.369 Triliun.⁴⁸ Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan pembiayaan bantuan pangan terutama luar Jawa akibat data lapangan belum sempurna.⁴⁹ Ketidakakuratan basis data mempengaruhi penyaluran bantuan sosial.⁵⁰ Meskipun memiliki tujuan utama meningkatkan pangan tetapi orientasi

⁴⁶ Victor Nechifor et al., "Food Security and Welfare Changes under COVID-19 in Sub-Saharan Africa: Impacts and Responses in Kenya," *Global Food Security* 28, no. February (March 2021): 8, <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100514>.

⁴⁷ Menko PM, *Rangkuman Informasi Seputar Sembako* (Jakarta Pusat, 2020), <https://share.google/1IMnPJzrdaZ5OvaT>.

⁴⁸ BPS, "Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Provinsi, 2024," Badan Pusat Statistik, 2025,

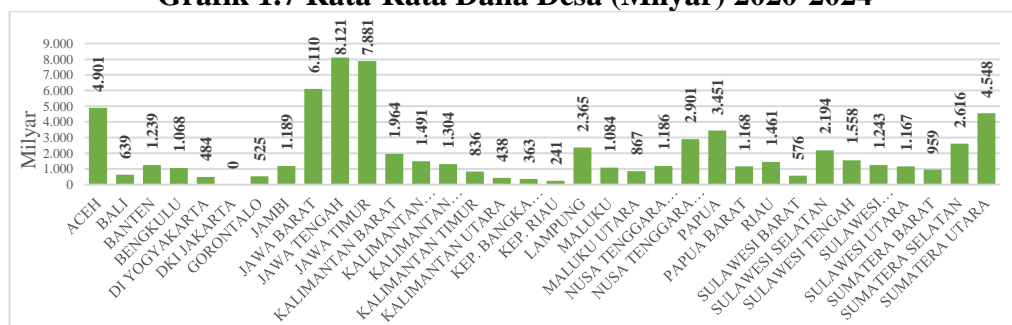
⁴⁹ Kemenko PMK, "Temukan Bansos Tidak Merata Di Kantong Kemiskinan, Menko PMK: Data Lapangan Harus Disempurnakan," *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, last modified 2021, accessed September 22, 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/temukan-bansos-tidak-merata-di-kantong-kemiskinan-menko-pmk-data-lapangan-harus-disempurnakan>.

⁵⁰ Wildan Rahmansyah et al., "Pemerataan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan COvid-19 Di Indonesia," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 2, no. 1 (September 30, 2020): 100, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/995>.

cenderung pemenuhan kebutuhan konsumtif dan jangka pendek semata tanpa diiringi dengan peningkatan tingkat produktivitas jangka panjang.

Begitupun alokasi Dana Desa berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu Peraturan “Menteri keuangan RI No. 205/PMK.07/2019: Pengelolaan Dana Desa”, sebagai prioritas pembiayaan dan kemandirian masyarakat untuk kesejahteraan, taraf hidup, pemberantasan kemiskinan.⁵¹ “Peraturan Menteri Kemendes PD TT No. 2 tahun 2024: Petunjuk Operasional Dana Desa” dialokasikan dalam bantuan tunai, penanganan stunting, ketahanan pangan, maupun pendampingan.⁵² Berikut:

Grafik 1.7 Rata-Rata Dana Desa (Milyar) 2020-2024



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025

Mengacu Grafik 1.7 Persebaran berpusat di Pulau Jawa terutama Jawa Tengan rata-rata Rp8.121 Miliar dan Jawa Timur Rp7.881 Miliar. Luar Jawa yaitu di Aceh rata-rata Rp4.901 Miliar.⁵³ Alokasi dana desa disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk.⁵⁴ Kebijakan fiskal strategis penentu produktivitas

⁵¹ Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK/07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa” (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019), 36, <https://share.google/wSLsIfCXgcyYb5ttd>.

⁵² Kemendes PD TT, “Peraturan Meteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025” (Jakarta: DJIH Kemendesa PDT, 2025), 4.

⁵³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, “Postur Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TTKD),” *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan*, last modified 2025, accessed September 30, 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>.

⁵⁴ DPR RI, *Efektivitas Dana Desa* (Jakarta, 2020), 3, <https://share.google/wSLsIfCXgcyYb5ttd>.

baik produksi, konsumsi dan distribusi pangan melalui subsidi, insentif pajak, serta stabilitas pangan.⁵⁵ Temuan Sofyan, pemanfaatan dana desa melalui BUMDes memfasilitasi dan penyediaan infrastruktur, hingga program pemberdayaan.⁵⁶ Temuan Danny C, bantuan pangan tidak hanya untuk krisis serta korupsi menyebabkan ketidakefektifan program bantuan pangan.⁵⁷ Bantuan sosial untuk kelompok rentang, terdampak bencana, maupun pemenuhan pasokan makanan.⁵⁸ Bantuan sosial pangan dan dana desa berperan penting menciptakan kesejahteraan dalam hal kecukupan pangan, terkhusus dana desa dapat digunakan pembangunan infrastruktur rendah di wilayah 3T.

Namun, efektifitas *blended finance* terutama *commercial funding* (pembiayaan syariah, dan *peer to peer*), *social funding* (pendistribusian zakat) dan *public funding* (bantuan sosial pangan dan dana desa) dalam mendorong ketahanan pangan bergantung pada kondisi perekonomian ekonomi wilayah yang menjadi transmisi dalam menyalurkan pada sektor produktif. Inklusi keuangan disertai dengan pertumbuhan pertanian, pendapatan perkapita pendidikan berdampak pada ketahanan pangan.⁵⁹ Begitupun pertumbuhan secara inklusif mendorong terciptanya inklusi keuangan, penciptaan lapangan

⁵⁵ Fajri Muharja and Abdullah Al Mizan, *Kebijakan Fiskal Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Sumatera Barat* (Padang, 2025), 3–4, <https://share.google/sigeiAjsz1z3t46Zw>.

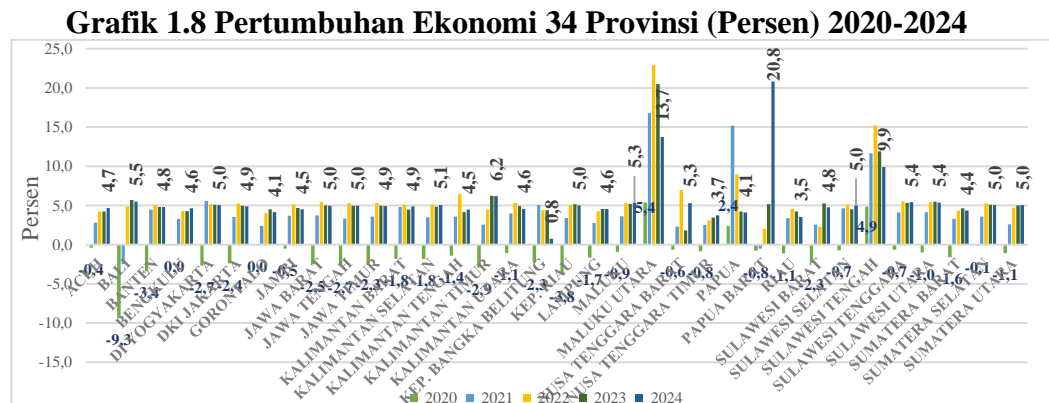
⁵⁶ Sofyana et al., “The Impact of Village Funds on the Indonesian Economy: Expansion and Progress,” *Teunuleh Scientific Journal The International Journal of Social Sciences* 6, no. 3 (2025): 227–237.

⁵⁷ Danny Cassimon, Olusegun Fadare, and George Mavrotas, “The Impact of Food Aid and Governance on Food and Nutrition Security in Sub-Saharan Africa,” *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 2 (2023): 1–19.

⁵⁸ Badan Pangan Nasional, *Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan 2024* (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2024), 12, <https://share.google/Y11R03eNqLxdo9yao>.

⁵⁹ Ameena Arshad, “Impact of Financial Inclusion on Food Security: Evidence from Developing Countries,” *International Journal of Social Economics* 49, no. 3 (February 21, 2022): 336–355, <http://www.emerald.com/ijse/article/49/3/336-355/159274>.

kerja dan peningkatan investasi.⁶⁰ Oleh karenanya, aspek keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi menjadi acuan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan Grafik 1.8 selama tahun 2020-2024. Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi berangsur pulih dengan rata-rata sebesar 5 persen, berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Mengacu pada Grafik 1.8 Pertumbuhan di Maluku Utara 13 persen, Sulawesi Tengah 9,9 persen dan Papua 20,8 persen dikarenakan meningkatnya aktivitas pertambangan termasuk kegiatan hilirisasi sedangkan diprovinsi lain pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dan mendorong tranformasi struktural masyarakat bila sekedar mengacu kenaikan output tanpa diimbangi dengan penguatan struktural, dan redistribusi pendapatan mendorong pemeratan distribusi. Mengacu UNDP, pertumbuhan disertai distribusi kekayaan, pengetasan kesenjangan, inklusi keuangan dan pembiayaan, produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi industri

⁶⁰ Sumaira Batool and Muhammad Ramzan Sheikh, "Food Security in Developing Countries: Role of Agricultural Exports, Income Inequality and Economic Growth," *Journal of Education and Social Studies* 5, no. 2 (June 30, 2024): 435–452, <https://www.scienceimpactpub.com/journals/index.php/jess/article/view/871>.

mendorong terciptanya pertumbuhan inklusif mengarah kesejahteraan.⁶¹ Studi Guerrache Mohamed, korelasi kuat antara PDRB dan kinerja sektor pertanian.⁶² Studi Suryanto, pertumbuhan ekonomi berpotensi mendorong ketahanan pangan di kab/kota Jawa Tengah.⁶³ Studi Mario F et al, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketahanan pangan melalui pengembangan diversifikasi produk, peningkatan akses pangan dan produktivitas pangan.⁶⁴ oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi mekanisme menjembatani *blended finance* mengarah dampak nyata melalui pembiayaan ketahanan pangan.

Terjadinya ketimpangan secara struktural menjadi sebab akses teknologi dan sumberdaya modal tidak terolah merata (ketimpangan ekonomi). Begitupun ketergantungan tinggi pada negara maju menjadi sebab ketidakmerataan, dan petani lokal terpinggirkan akibat sistem global serta petani kecil golongan rentan terjebak lingkaran kemiskinan. Oleh karenanya, diperlukan strategi akses pembiayaan, pemberdayaan, inovasi serta pelatihan sebagai stimulus produktivitas dan ketahanan pangan secara inklusif.⁶⁵ Didukung meningkatnya pembiayaan pertanian menunjang produktivitas baik tanaman pangan, tanaman

⁶¹ United Nations Development Programme, *UNDP's Strategy for Inclusive and Sustainable Growth* (New York: United Nations Development Programme, 2017), 6–11, [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDPs Inclusive and Sustainable Growth-final.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDPs%20Inclusive%20and%20Sustainable%20Growth-final.pdf).

⁶² Guerrache Mohamed et al., "Identifying Determinants of Food Security Using Panel Data Analysis: Evidence from Maghreb Countries," *Economies* 12, no. 4 (April 15, 2024): 91, <https://www.mdpi.com/2227-7099/12/4/91>.

⁶³ Suryanto Suryanto et al., "The Impact of Climate Change, Economic Growth, and Population Growth on Food Security in Central Java Indonesia," *Nature Environment and Pollution Technology* 22, no. 2 (June 1, 2023): 1017–1022, [https://neptjournal.com/upload-images/\(48\)D-1442.pdf](https://neptjournal.com/upload-images/(48)D-1442.pdf).

⁶⁴ Mario Fernandes and Palupi Lindiasari Samputra, "Exploring Linkages between Food Security and Economic Growth: A Systematic Mapping Literature Review," *Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences* 16 (May 5, 2022): 206–218, <https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1734>.

⁶⁵ Ariady Arsal et al., *Teori Sosial Modern & Post Modern: Serta Penerapannya Untuk Kesejahteraan Petani* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2025), 208–9.

hutan dan ternak termasuk mendorong pembangunan secara berkelanjutan.⁶⁶ Pembiayaan pertanian dan belanja pertanian sebagai reaksi peningkatan petani miskin pedesaan dengan meningkatkan investasi berupa layanan, infrastruktur dan subsidi pertanian.⁶⁷ Inklusi keuangan berperan krusial menunjang ketahanan pangan di negara maju maupun berkembang.⁶⁸ Dengan demikian akses pembiayaan dapat dijadikan sebagai instrumen krusial inklusi keuangan dan penunjang pertumbuhan sektor pertanian berdampak pada ketahanan pangan yang mendukung studi ini.

Redistribution with growth menjadi strategi mendorong pertumbuhan berorientasi pemerataan pendapatan ataupun pembiayaan diarahkan sektor riil akselerasi pengetasan kelaparan bagian capaian pembangunan berkelanjutan. Diperlukan peningkatan produksi pangan lokal dan kemandirian melalui optimalisasi alokasi alternatif pembiayaan dari berbagai bersumber antaranya pembiayaan syariah menekankan keadilan dan produktivitas ekonomi, pendistribusian zakat untuk golongan rentan mendorong kemandirian pangan. Kemudian alokasi fiskal memperkuat infrastruktur logistik dan pengembangan wilayah, serta peranan digitalisasi fintech meningkatkan akses keuangan. Oleh karenanya pendekatan pembiayaan berbagai sumber saling terintegrasi *blended finance* secara komprehensif walaupun masing-masing instrumen pembiayaan memiliki keterbatasan dan risiko.

⁶⁶ Phuoc Huu Vo and Thanh Quang Ngo, "The Role of Agricultural Financing and Development on Sustainability : Evidence from ASEAN Countries," *AgBioForum*, 23, no. 1 (2021): 22–31.

⁶⁷ Samuel Duku et al., "Role of Agricultural Finance and Investment in Reducing Rural Poverty in Ghana : Insights from Wavelet Coherence Analysis," *Discover Sustainability Research* 6, no. 996 (2025).

⁶⁸ Yasmin Yasmin and Sekar Utami Setiastuti, "The Effect of Financial Inclusion on Food Security : Evidence from Developing and Developed Countries The Effect of Financial Inclusion on Food Security : Evidence from Developing and Developed Countries," *Economics and Finance in Indonesia* 69, no. 2 (2023).

Dengan demikian, peran pendanaan sebagai stimulus mendorong produktivitas sektor riil terutama sektor pertanian berkontribusi pada ketahanan pangan mempercepat pengetasan kelaparan (SDGs *no hunger*) berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Indonesia. Didasarkan pada dampak kerawanan pangan dan kelaparan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan hingga kematian.⁶⁹ Dengan peningkatan produktivitas pertanian jalan keluar dari kemiskinan dan kekurangan gizi berbasis pertanian.⁷⁰ Selaras rencana aksi BPN 2024, pembangunan pangan dengan sasaran tercukupi kebutuhan dan stabilitas, pengetasan kerawanan, kualitas dan kuantitas yang berkaitan dengan pangan.⁷¹

Urgensi studi, kelaparan menjadi isu ketahanan pangan global dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Kesenjangan berdasarkan fenomena menunjukkan tingkat ketidakcukupan pangan tertinggi mencapai 33,3 persen di Papua, kemudian Maluku 31,8 persen, Maluku Utara 30,6 persen.⁷² Begitupun, ketahanan pangan terukur dari IKP Provinsi Papua dan Papua Barat, Riau, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dikategorikan ketahanan pangan yang lemah dibandingkan Provinsi lainnya.⁷³ Dilain sisi, konsentrasi dari instrumen pembiayaan syariah, distribusi zakat, dan pembiayaan *peer to peer* termasuk sebagian besar alokasi fiskal berpusat di Pulau Jawa yang memiliki indeks ketahanan pangan tertinggi. Sedangkan di luar Jawa seperti Papua, Maluku dan

⁶⁹ Olumide Arigbede et al., "Hunger, Food Security, and Sovereignty: A Need for Evidence-Based Public Health Approaches to Meet Sustainable Development Goals," *International Journal of Public Health* 68, no. August (2023): 1.

⁷⁰ Prabhu Pingali and Milorad Plavšić, "Hunger and Environmental Goals for Asia: Synergies and Trade-Offs among the SDGs," *Environmental Challenges* 7 (April 2022): 3, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2667010022000518>.

⁷¹ BPN, *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional* (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2024), 8, <https://share.google/Y11R03eNqLxdo9yao>.

⁷² BPS, "Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen), 2024."

⁷³ Badan Pangan Nasional, "Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Update Tahun 2024."

Nusa Tenggara menjadi tantangan pembangunan, minim akses dan jangkauan instrumen pembiayaan yang menjadi sebab terjadinya akses pangan tidak merata dan kerawanan pangan tinggi. Kondisi ini menjadi isu adanya disparitas dan kesenjangan wilayah yang diperluhkan analisis komprehensif penelitian.

Begitupun kontribusi ekonomi Pulau Jawa lebih dari 50 persen atau sekitar 57 persen menjadikan dominan pusat perekonomian secara nasional sedangkan diluar Jawa rendah Sumatra sebesar 22,01 persen, Kalimantan 8,49 persen, Sulawesi 7,10 persen, Maluku dan Papua menyumbangkan 2,58 persen Serta Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen di tahun 2023. Selain itu, di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, Papua, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan juga Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang ekstrem. Sedangkan pertumbuhan rendah terjadi di Kep Riau, Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Papua Barat.⁷⁴ Kondisi ini mendukung adanya fenomena ketimpangan pembangunan yang tidak merata karena berkaitan mewujudkan kesejahteraan dan standar hidup secara adil.

Sedangkan kesenderungan studi terdahulu, menunjukkan temuan produk pembiayaan syariah solusi dan alternatif pembiayaan pengembangan sektor pertanian oleh Syaiful M.I et al,⁷⁵ dan Azhar Alam et al.⁷⁶ Kemudian

⁷⁴ Badan Pusat Statistik, *Perekonomian Indonesia 2024* (Jakarta, 2024), 29–32, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/20/3f6dbcd515737b5c8e40d497/laporan-perekonomian-indonesia-2024.html>.

⁷⁵ Syaiful Muhamad Irsyad et al., “The Role of Islamic Microfinance Institutions in Promoting Development and Sustainability Agricultural Entrepreneurship Sector,” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2024): 4–6.

⁷⁶ Azhar Alam et al., “The Determinant of Shariah Financing in the Agricultural Sector: Evidence from Indonesia,” *Journal of Asian Finance* 9, no. 4 (2022): 287–0298.

studi Abdul Ghafar et al,⁷⁷ dan Amin Songgirin et al,⁷⁸ terkait potensi pendistribusian zakat berbasis program ketahanan pangan. Peranan fintech, pembiayaan *peer to peer* mendorong inklusifitas pembiayaan dalam meningkatkan jangkauan pembiayaan termasuk untuk ketahanan pangan dan pertanian, oleh studi Eka N et al,⁷⁹ dan Muner M. Alshater et al.⁸⁰ Selain itu, bantuan sosial meningkatkan akses pangan dan jaringan pengamanan sosial rumah tangga miskin di sektor pertanian M. Rismawan et al,⁸¹ dan Saeed Nosratabadi et al.⁸² Serta dana desa mendukung produktivitas pertanian dalam bentuk penyediaan infrastruktur, pemberdayaan, penyediaan pupuk seperti studi Trigheofani S. Hasan et al,⁸³ dan Sri Marwanti et al.⁸⁴ Keseluruhan studi terdahulu menunjukkan peran krusial masing variabel pembiayaan syariah, pendistribusian zakat, pembiayaan *peer to peer*, dan bantuan sosial pangan dan

⁷⁷ Abdul Ghafar Ismail et al., “Islamic Public Finance : How It Matters for Achieving SDGs,” *EJIF: Europea Journal of Islamic Finance* 12, no. 2 (2025): 15–29, <https://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/index>.

⁷⁸ Amin Songgirin and Ahmad Maulidizen, “Penyaluran Zakat Ke Sektor Pertanian Sebagai Strategi Pemberdayaan Dan Ketahanan Pangan Keluarga,” *Sosio Informa* 8, no. 3 (2022): 214–28.

⁷⁹ Eka Nurhalimatus Sifa et al., “Islamic Financing to Improve Farmers’ Welfare and Food Sustainability: A Literature Review,” *Review of Integrative Business and Economics Research* 11, no. 1 (2022): 234.

⁸⁰ Muneer M. Alshater et al., “Fintech in Islamic Finance Literature: A Review,” *Heliyon* 8, no. 9 (2022): 1–24, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.

⁸¹ M. Rismawan Ridha and Rumayya Rumayya, “Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non-Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pertanian Di Maluku,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 24, no. 1 (January 1, 2024): 17–30, <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol24/iss1/2/>.

⁸² Saeed Nosratabadi et al., “Social Capital Contributions to Food Security: A Comprehensive Literature Review,” *Foods* 9, no. 11 (November 12, 2020): 1650, <https://www.mdpi.com/2304-8158/9/11/1650>.

⁸³ Trigheofani S Hasan, Yuliana Bakari, and Muhammad Zubair Hippy, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Pertanian Di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo,” *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 9, no. 2 (2024): 148–159.

⁸⁴ Sri Marwanti, Aan Nurwanto, and Ernoiz Antriyandarti, “The Effect of Village Funds on Food Security in Dander, Bojonegoro,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1471, no. 1 (2025).

dana desa berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan baik ditingkat petani, komunitas, wilayah dan nasional konteks pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan literatur terbatasnya penelitian yang mengkombinasikan kelima instrumen *blended finance* terutama *commercial funding* (pembiayaan syariah, dan pembiayaan *peer to peer*), *social funding* (pendistribusian zakat) dan *public funding* (bantuan sosial pangan dan dana desa) yang menjadi kerangka analisis komprehensif dan simultan dengan kecenderungan uji parsial melibatkan satu hingga dua variabel terpisah. Hal ini selaras dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) ketahanan pangan membutuhkan kombinasi pembiayaan baik dari sektor publik dan swasta.⁸⁵ Kemudian relatif terbatas studi integrasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi jalur intervening sebagai mekanisme yang menghubungkan variabel pembiayaan dan ketahanan pangan selaras teori *redistribution with growth* diarahkan pada sektor produktif yang berkaitan dengan ketahanan pangan secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi mekanisme menjembatani kontribusi berbagai sumber pembiayaan mendorong dampak nyata mewujudkan pertumbuhan disertai pemertaaan. Selain itu, pendekatan sebagian besar berfokus studi kualitatif dengan pendekatan berbasis literatur, meskipun terdapat beberapa dilakukan secara kuantitatif.

Kemudian secara metodologis penelitian ini mengkombinasikan analisis jalur (*path analysis*) dan analisis *Multigroup Analysis* (MGA) berbasis data panel yang terwakili 34 provinsi untuk menganalisis instrumen *Blended finance*

⁸⁵ FAO et al., *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 – Financing to End Hunger, Food Insecurity and Malnutrition in All Its Forms* (Rome: The State of the World series, 2024), 53, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/39dbc6d1-58eb-4aac-bd8a-47a8a2c07c67/content/state-food-security-and-nutrition-2024/definition-financing-food-security.html#gsc.tab=0>.

antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa atas fenomena pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan karakteristik wilayah yang beragam terutama antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Sehingga penelitian ini tidak mengabaikan adanya disparitas struktural antara kedua kawasan tersebut. Hadirnya penelitian ini sebagai menggali lebih dalam ketiga kesenjangan tersebut sekaligus rentang tahun 2020-2024 atas pertimbangan ketersediaan data. Tujuan studi ini, menganalisis 1) secara langsung variabel *blended finance* terhadap ketahanan pangan dan 2) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dengan analisi jalur (*path analyse*) dengan kombinasi analisis *Multi-Group Analysis* (MGA) untuk menguji perbedaan pengaruh di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Instrumen pembiayaan syariah, pendistribusian zakat, pembiayaan *peer to peer*, bantuan sosial pangan dan dana desa berkontribusi peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan dalam ketahanan pangan, kemudian peran pertumbuhan ekonomi sebagai media kontribusi tidak langsung dalam daya beli, pemerataan dan peningkatan kapasitas produksi berkelanjutan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Permasalahan

Sesuai uraian permasalahan dilatarbelakang, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penelitian, berikut ini:

- a. Tingkat kerawanan dan kecukupan pangan di luar pulau Jawa seperti Papua, Nusa Tenggara dan Maluku dikategorikan tinggi akibat adanya disparitas pembangunan, alih fungsi lahan pertanian, upah, struktur pasar serta rendahnya fasilitas pendukung termasuk pembiayaan. Secara efektif potensi *blended finance* terutama pembiayaan syariah,

pendistribusian zakat, pembiayaan *peer to peer*, bantuan sosial pangan dan dana desa selaras kerangka pembiayaan *Food and Agriculture Organization* serta didukung dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab demikian, diperlukan pengujian *blended finance* terhadap ketahanan pangan dengan intervensi pertumbuhan ekonomi.

- b. Pembiayaan Syariah potensial mendanai pembangunan berkelanjutan termasuk program ketahanan pangan. Namun, pembiayaan syariah cenderung dominan di Pulau Jawa dan risiko tinggi atas pembiayaan pada sektor ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik mengidentifikasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap ketahanan pangan melalui *path analyse* dan *Multi-Group Analysis (MGA)*.
- c. Pendistribusian zakat, instrumen sosial Islam dengan fokus redistribusi teralokasikan dalam program ketahanan pangan. Tetapi pendistribusian zakat dominan di Provinsi Jawa serta pengelolaan belum optimal akibat rendahnya kesadaran. Hal ini menjadi tantangan pendistribusian zakat mendukung ketahanan pangan. Oleh karenanya, pengujian statistik dapat mengungkapkan pengaruh pendistribusian zakat terhadap ketahanan pangan uji *path analyse* dan *Multi-Group Analysis (MGA)*.
- d. Pembiayaan *peer to peer* mendorong inklusivitas pembiayaan masyarakat unbanked. Namun, rendahnya literasi digital, SDM, sarana digitalisasi membatasi potensi mendukung ketahanan pangan. Oleh karenanya dengan pengujian statistik berkontribusi mengungkapkan pengaruh pembiayaan *peer to peer* terhadap ketahanan pangan dengan uji *path analyse* dan *Multi-Group Analysis (MGA)*.

- e. Bantuan sosial pangan memastikan kecukupan pangan dasar kaum marginal. Kondisi lapangan menunjukkan alokasi bantuan sosial pangan terjadi ketimpangan akibat data lapangan belum sempurna. Dengan adanya permasalahan ini, pengujian statistik berkontribusi mengungkapkan pengaruh bantuan sosial pangan terhadap ketahanan pangan dengan uji *path analyse* dan *Multi-Group Analysis* (MGA).
- f. Dana desa sebagai alokasi fiskal untuk pembangunan desa, kesejahteraan termasuk fasilitas sektor pertanian. Namun, ketimpangan alokasi serta inefisiensi pengelolaan menyebabkan ketidakefektifan alokasi dana desa. Hal ini menghambat dalam mendukung program ketahanan pangan di provinsi Indonesia. Oleh karenanya perlukan pengujian secara lanjut pengaruh terhadap ketahanan pangan dengan uji *path analyse* dan *Multi-Group Analysis* (MGA).
- g. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang sejahtera dan memperkuat ketahanan pangan diharapkan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi dihadapkan stagnasi dengan rata rata berkisar 5 persen. Dipeluhkan optimalisasi pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya *redistribution with growth* pembiayaan yang mendorong produktivitas pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan. Sehingga pertumbuhan ekonomi sebagai transmisi dan mengoptimalkan ketahanan pangan.

2. Batasan Permasalahan

Sedangkan batasan permasalahan ditetapkan supaya penelitian lebih fokus dan tidak menyeleweng. Adapun batasan penelitian, berikut:

- a. Objek penelitian berfokus pada ketahanan pangan provinsi di Indonesia.
- b. Variabel penelitian *blended finance* berasal dari data agregat 34 provinsi yaitu *commercial funding* (pembiayaan syariah, dan pembiayaan *peer to peer*), *social funding* (pendistribusian zakat) dan *public funding* (bantuan sosial pangan dan dana desa).
- c. Pembiayaan sebagai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024 yang mencakup pembiayaan syariah, pendistribusian zakat, pembiayaan *peer to peer*, bantuan sosial pangan dan dana desa sebagai melalui pertumbuhan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada indentifikasi dan batasan permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini diperoleh beberapa perumusan masalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan syariah terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh pendistribusian zakat terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *peer to peer* terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh bantuan sosial pangan terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?

5. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
7. Bagaimana pengaruh pembiayaan syariah terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
8. Bagaimana pengaruh pendistribusian zakat terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
9. Bagaimana pengaruh pembiayaan *peer to peer* terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
10. Bagaimana pengaruh bantuan sosial pangan terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?
11. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi

Indonesia, serta apakah terdapat perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan studi sesuai yang telah ditetapkan pada rumusan masalah, berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pembiayaan syariah terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta menguji perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dengan multigroup analysis tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendistribusian zakat terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta menguji perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pembiayaan *peer to peer* terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta menguji perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh bantuan sosial pangan terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta menguji perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.
5. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dana desa terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta menguji perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.
6. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketahanan pangan di 34 Provinsi Indonesia, serta menguji perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.

7. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pembiayaan syariah terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta menjelaskan perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.
8. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendistribusian zakat terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta menjelaskan perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024.
9. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pembiayaan *peer to peer* terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta menjelaskan perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024
10. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh bantuan sosial pangan terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta menjelaskan perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024
11. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dana desa terhadap ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 34 Provinsi Indonesia, serta menjelaskan perbedaan pengaruh antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tahun 2020-2024

Secara teoritis penelitian ini bukan hanya sekedar melakukan pengujian data secara statistik melainkan juga relevansi teori *redistribution with growth* mengacu pertumbuhan ekonomi sebagai mekanisme menjelaskan hubungan pembiayaan syariah, pendistribusian zakat, pembiayaan *peer to peer*, bantuan

sosial pangan dan dana desa dalam konteks ketahanan pangan baik di 34 Provinsi maupun antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian menghasilkan luaran menyumbangkan manfaat dan kontribusi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi memberikan sumbangan pengembangan ilmu ekonomi berkaitan pembiayaan syariah, sosial, digital maupun fiskal terhadap ketahanan pangan dijumpai pertumbuhan ekonomi untuk mengukur dampak secara langsung dan tidak langsung serta pengembangan teori ekonomi Islam, ekonomi pembangunan dan keuangan konteks ketahanan pangan dan pengetasan kelaparan.

2. Manfaat Praktis

a. Teruntuk pemerintah sebagai pertimbangan efektifitas pembiayaan pengembangan regulasi program pengetasan kelaparan melalui fiskal serta kerjasama lintas sektoral terutama perbankan syariah, Baznas dan lembaga fintech merumuskan sinergi pembiayaan sektor riil terkhusus sektor pertanian tujuan pengetasan kelaparan secara inklusif Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Penguatan regulasi dan kebijakan pembiayaan syariah dan pembiayaan *peer to peer* ketahanan pangan termasuk sektor pertanian mengingat tingginya risiko atas pembiayaan. Kemudian memperkuat potensi pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang pemberdayaan ekonomi penguatan ketahanan pangan serta optimalisasi sumber fiskal baik bantuan sosial pangan dan dana desa terarah dan mendukung pertanian krusial mendorong perbaikan ketahanan pangan.

- b. Bagi akademik dijadikan sumber referensi empiris terkait analisis model analisis jalur bidang ekonomi pembangunan, ekonomi syariah pada konteks ketahanan pangan serta hasil studi sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang lebih komprehensif.
- c. Bagi masyarakat dijadikan informasi praktis peranan pembiayaan berkontribusi peningkatan produktivitas pertanian. Meningkatkan peran masyarakat dalam produktivitas melalui layanan keuangan syariah dan digital serta memantau bantuan sosial dan dana desa agar tepat sasaran.

F. Penegasan Istilah

Berisi penjelasan istilah pada judul penelitian bertujuan mempermudah pemahaman dijelaskan secara konseptual dan operasional:

1. Konseptual
 - a. Ketahanan Pangan sebagai kondisi ketersediaan pangan secara inklusif yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan.⁸⁶
 - b. Pembiayaan syariah bentuk perjanjian didasarkan hukum islam yang berlangsung antara perbankan dan pihak lain untuk melakukan penyimpanan ataupun pembiayaan untuk kegiatan sesuai syariah.⁸⁷
 - c. Pendistribusian zakat kegiatan penyaluran zakat ditunjukkan mencukupi kebutuhan dasar, mengembangkan dan kemandirian⁸⁸

⁸⁶ Ade Suhara et al., *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat Teori Dan Praktik*, ed. Nanny Mayasari (Bandung: Widia Media Utama, 2025), 229,

⁸⁷ Andri Soemitra, Zuhrinal M. Nawawi, and Muhammad Syahbudi, *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Di Indonesia* (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2022), 83,

⁸⁸ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 64, https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_dan_Manajemen_ZISWAF_Zakat_Infak/2Q1pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

- d. Pembiayaan *peer to peer* bentuk pembiayaan pribadi maupun kelompok dengan perantara platform *peer to peer lending* sebagai alternatif dari pinjaman yang fleksibel, dan proses yang cepat.⁸⁹
- e. Bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial dalam berupa non tunai untuk penerima bantuan pangan dasar tiap bulan berupa kupon elektronik yang senilai uang untuk ditukarkan sembako di *e-warong*.⁹⁰
- f. Dana desa sebagai transfer dari pusat ke daerah yang ditunjukkan untuk desa bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan dalam pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.⁹¹
- g. Pertumbuhan ekonomi proses peningkatan output barang/jasa periode tertentu dan terjadi perubahan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.⁹²

2. Operasional

Pada penelitian dilakukan diidentifikasi, dan diklasifikasikan variabel secara operasional oleh peneliti, berikut:

- a. Ketahanan pangan mengacu pada kecukupan, akses dan pengelolaan pangan secara merata sebagai skoring dalam indeks ketahanan pangan.

⁸⁹ Nurhasanah, Iwil Suprianto, and Syahida, *Pengetahuan Manajemen Keuangan Bisnis Dalam Berwirausaha* (Bandung: Penerbit Widina, 2025), 55, https://www.google.co.id/books/edition/PENGETAHUAN_MANAJEMEN_KEUANGAN_BISNIS_DA/UelMEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pembiayaan+Peer+to+Peer+definisi&pg=PA55&printsec=frontcover.

⁹⁰ Ade Maharini Adiandari, *Penerapan Literasi Keuangan* (Klaten: Nas Media Pustaka, 2023), 49, https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Literasi_Keuangan/zsDaEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

⁹¹ Kemendes PD TT, “Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025,” 2–3.

⁹² Zainul Bahri and Vinni Aprilianti, *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, Dan Blue Economy* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2023), 1,

- b. Pembiayaan syariah merujuk pada peran perbankan dalam mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah terutama pembiayaan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Pendistribusian zakat sumber keuangan non profit berasal dari akumulasi dana umat muslim terutama zakat berasal dari Baznas.
- d. Pembiayaan *peer to peer*, mengacu pada pembiayaan secara digital tanpa perantara bersumber dari OJK.
- e. Bantuan sosial pangan, mengacu sumber APBN redistribusi ke APBD tingkat kabupaten/kota melalui program bantuan sosial.
- f. Dana desa, mengacu sumber APBN redistribusi ke APBD tingkat kabupaten/kota melalui dana desa untuk pembangunan wilayah.
- g. Pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator kondisi sosial ekonomi atas peningkatan produktivitas output ekonomi terukur dengan peningkatan PDB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi urutan penyusunan Tesis sesuai rencana dan pedoman, berikut:⁹³

1. Bagian Awal: cangkupan terdiri halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian Inti
Bab I Pendahuluan: menguraikan fenomena penelitian dan urgensi penelitian terkait ketahanan pangan; identifikasi dan batasan masalah;

⁹³ UIN SATU Tulungagung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungung* (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2024), 6–10.

rumusan masalah; tujuan, hipotesis, dan manfaat penelitian; penegasan istilah dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Landasan Teori: uraian Grand teori yang relevan diperoleh terkait dengan ketahanan pangan, pembiayaan syariah, pendistribusian zakat, pembiayaan *peer to peer*, bantuan sosial pangan, dana desa dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dilakukan penelitian ini, serta kerangka berpikir konseptual.

Bab III Metode Penelitian: uraian rancangan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif *explanatory research*, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, analisis dengan *path analyse* dan *Multi-Group Analysis* (MGA) untuk menguji perbedaan pengaruh di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, kemudian analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian: uraian hasil analisis data melalui uji deskriptif, uji outer dan uji inner sebagai bagian dari uji *path analyse* dan *Multi-Group Analysis* (MGA) serta menginterpretasi hasil olah data.

Bab V Pembahasan: menguraikan hasil temuan analisis, kemudian dijelaskan dengan argumen dikaitkan teori yang relevan dan didukung penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan.

Bab VI Penutup: peneliti menyimpulkan dari hasil pembahasan berupa implikasi dari temuan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang ditunjukkan untuk pemerintah, lembaga terkait, dan juga masyarakat.

3. Bagian Akhir: mBAB I mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup peneliti.